Prabowo Jangan Jual Indonesia ke Asing .....

Dari Halaman 1

narasi pendidikan nasional, termasuk lewat proyek penulisan ulang sejarah," tegas pengunjuk rasa sembari membacakan sejumlah tuntutan lainnya, yakni menuntut keterbukaan perjanjian bilateral dan kebijakan ekonomi strategis, termasuk transparansi kerja sama Amerika Serikat - Indonesia yang dinilai timpang dan merugikan rakyat.

Untuk itu mahasiswa menuntut dan berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menjual negara ke pihak asing khususnya Amerika Serikat.

Massa mahasiswa juga mengkritik kebijakan tambang dan energi, termasuk nikel, tembaga, dan batu bara, mendesak disahkan Perpu Perampasan Aset, menuntut pembatalan RUU Polri, pembentukan batalyon baru di Aceh yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip sipil, hapuskan kekerasan seksual dan usut tuntas beras oplosan yang meresahkan masyarakat.

Dalam orasinya para mahasiswa juga mengecam keras pimpinan dan anggota DPRD Sumut yang tidak seorangpun hadir menerima aspirasi mereka. Padahal massa sudah lama berorasi di bawah terik matahari di depan pintu gerbang utama gedung dewan.

Aksi mahasiswa mendapat pengawalan ketat ratusan aparat kepolisian dari berbagai satuan di Polda Sumut, karena sejak pagi sudah beredar isu, bahwa massa mahasiswa akan datang ribuan orang "mengepung" gedung DPRD Sumut dengan mengusung thema "Indonesia Cemas 2025".

Tapi setelah ditunggu-tunggu, pada pukul 15.00 WIB, massa mahasiswa ternyata hanya datang puluhan orang. Padahal aparat kepolisian sudah berjaga-jaga dan siap siaga dengan jumlah personil ratusan orang, sehingga jelas terlihat ketimpangan massa dengan aparat kepolisian.

Setelah berorasi cukup lama di depan pintu gerbang gedung dewan, akhirnya aspirasi mahasiswa diterima anggota DPRD Sumut Alfahri Rangkuti dan Alfiansyah Ujung seraya berjanji akan menyalurkannya ke pemerintah pusat dan DPR RI di Jakarta, karena tuntutan tersebut sebagian besar berskala nasional.

Kedua anggota dewan ini duduk di aspal bersama mahasiswa dengan melakukan dialog dengan para mahasiswa, karena mereka tetap menuntut komitmen anggota dewan dalam menyikapi berbagai permasalahan bangsa saat ini.**(A-06)**

Massa BEM SI Rusak Spanduk Imbauan .....

Dari Halaman 1

besi yang dipasang polisi ke arah Patung Kuda. Massa lalu maju menuju ke depan barrier.

Beberapa dari massa memanjat barrier dan menarik spanduk imbauan yang dibawa polisi.

Spanduk itu berisi imbauan agar aksi demonstrasi tidak membawa barang berbahaya.

Melalui pengeras suara, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo meminta massa yang merusak untuk menyerahkan diri.

"Anda sudah merusak. Kami ingatkan yang tadi merusak menyerahkan diri," kata Susatyo melalui pengeras suara.

Setelahnya, polisi mendorong mahasiswa untuk mundur. Namun mahasiswa tetap bertahan dan berorasi.

Terdapat 11 tuntutan yang dibawa BEM SI pada aksi hari ini, mulai dari penolakan penulisan ulang sejarah Indonesia hingga mendesak pembahasan partisipatif dalam RKUHAP.

"Penolakan keras terhadap upaya pengaburan sejarah. Tolak politisasi sejarah untuk kepentingan elit," bunyi poin pertama tuntutan BEM SI.

Lalu, mereka juga mendesak melaksanakan peninjauan kembali pasal bermasalah RKUHAP.

BEM SI meminta pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUU, penundaan pengesahan hingga seluruh poin kontroversial diselesaikan.**(cnni/js)**

Demo di Jakarta Diwarnai Kericuhan .....

Dari Halaman 1

par ke arah barrier polisi. Sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara polisi dan massa.

Sebelum ricuh, massa bergantian menyampaikan orasi. Beberapa yang diprotes adalah soal RKUHAP. Mereka juga menolak penulisan ulang sejarah.

Massa juga menolak pembangunan lima batalyon di Aceh.

Massa sempat melakukan aksi simbolis dengan meniup lilin. Aksi itu disebut menandakan 'Indonesia Gelap'.

Hingga berita ini ditulis, situasi sudah kondusif, massa membacakan tuntutan yang mereka bawa.

BEM SI membawa sejumlah tuntutan dalam demonstrasi 'Aksi Indonesia (C)emas 2025' di Patung Kuda, Jakarta, Senin (28/7) hari ini.

Terdapat sejumlah tuntutan yang dibawa BEM SI pada aksi hari ini, mulai dari penolakan penulisan ulang sejarah Indonesia hingga mendesak pembahasan partisipatif dalam RKUHAP.

"Penolakan keras terhadap upaya pengaburan sejarah. Tolak politisasi sejarah untuk kepentingan elite," bunyi poin pertama tuntutan BEM SI.

Lalu, mereka juga mendesak melaksanakan peninjauan kembali pasal bermasalah di RKUHAP.

BEM SI meminta pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUU, penundaan pengesahan hingga seluruh poin kontroversial diselesaikan.

Sejumlah pasal yang disorot dalam draf RKUHAP sejauh ini adalah Pasal 93, Pasal 145 ayat I, Pasal 6, Pasal 106 ayat 1, Pasal 106 ayat 4, Pasal 23, dan Pasal 93 ayat 5c.

Selanjutnya BEM SI mendesak pemerintah transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral melindungi kepentingan ekonomi nasional dan melakukan diplomasi yang kuat, serta memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan.**(cnni/js)**

Bobby Beri Hadiah Gratis Cicilan Kredit Setahun .....

Dari Halaman 1

Sianipar, Juliner Sihombing, dan Santi Farida Hutabarat. Mereka adalah pelaku UMKM kuliner dan kerajinan tangan seperti pembuat ombus-ombus dan penenun ulos.

"Tadi ada lima pelaku UMKM kita beri hadiah cicilan usaha kredit gratis," ucap Bobby Nasution.

Di Provinsi Sumut, kata Bobby, ada 870 ribu pelaku UMKM. Sebanyak 3% yang sudah mempunyai NIB, dan 7,7% pelaku UMKM yang sudah mengadopsi akses pembiayaan. Kemudian sebanyak 19% pelaku UMKM sudah mengadopsi teknologi dan 4% sudah mengakses pasar digital.

"Ini angka yang menjadi pembelajaran bagi kami Sumut. Karena kita ketahui, Presiden menetapkan pertumbuhan ekonomi 8% tingkat nasional. Sebagai provinsi terbesar keempat, Sumut juga harus memberikan dukungan agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 8%," ucapnya.

Bobby menyebutkan kegiatan usaha dan investasi per tahun harus mencapai Rp56 triliun dalam satu tahun. "Kami yakin dari sektor UMKM bisa menyumbang sektor luar biasa," katanya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan acara tersebut menjawab aspirasi pelaku UMKM yang kesulitan dalam proses perizinan. "Maka Kementerian UMKM harus bisa mencari solusi dan langkah kita bisa mengantisipasi terkait wewenang perizinan," katanya.

Oleh sebab itu, Kementerian UMKM berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk memudahkan pelaku UMKM mengurus perizinan. "Ada perintah dari Pak Presiden untuk mengoptimalkan kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral dari setiap kementerian," katanya.

Hadir juga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan perangkat daerah Sumut dan Taput, 1.200 pelaku UMKM. **(A-05)**

Tunggu Perintah Presiden .....

Dari Halaman 1

bertugas di mana pun, menyesuaikan dengan arahan Prabowo.

Gibran menyampaikan ia juga sudah terbiasa turun langsung ke lapangan.

Ia menyebut hal itu merupakan komitmennya untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan sesuai dengan visi misi Prabowo.

"Minggu lalu sudah saya tegaskan, saya bisa berkantor di mana saja. Karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program dan visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik," ucap dia.

Ia pun mencontohkan kegiatannya di Pekanbaru hari ini. Mulai dari penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga berkunjung ke Sekolah Rakyat.

"Dan nanti terakhir kita akan menutup Muktamar Hima Persis," ujarnya.

Wacana Gibran berkantor di IKN sempat mengemuka belakangan. Usulan itu bersamaan dengan usul NasDem yang meminta pemerintah bersikap atas status dan nasib IKN.

NasDem meminta pemerintah menerbitkan Keppres terkait IKN. Mereka menyebut pemerintah harus memfungsikan IKN secara bertahap jika memang serius.

Salah satu tahapan yang diusulkan adalah menempatkan wakil presiden dan sejumlah Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN.

Terpisah, Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tak berencana mengeluarkan aturan terkait penempatan Gibranberkantor di IKN.

Pras menegaskan pemerintah terbuka dan menerima setiap usulan terkait IKN. Namun, hingga kini pemerintah belum berencana membuat aturan seperti itu.

"Tadi sudah dijelaskan, IKN kita terima semua masukan, tapi tidak ada rencana seperti itu," ujar Pras di komplek Istana Kepresidenan, Jumat (25/7)**.(cnni/js)**

Kejagung Dalami Info Riza Chalid di Malaysia .....

Dari Halaman 1

formasi yang disampaikan masyarakat termasuk dugaan keberadaan Riza Chalid di Malaysia.

Anang mengatakan seluruh informasi itu nantinya akan ditelaah serta didalami kebenarannya oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Termasuk kabar pernikahan Riza dengan seorang kerabat kerajaan Malaysia.

"Kami ucapkan terima kasih. Setiap informasi akan dikaji dan didalami oleh rekan-rekan penyidik dalam rangka upaya menghadirkan MRC," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (28/7).

Anang menambahkan saat ini penyidik masih berupaya memanggil Riza Chalid untuk diperiksa sebagai tersangka. Ia menyebut surat panggilan pemeriksaan kedua sebagai tersangka juga sedang disiapkan.

"Akan melakukan pemanggilan kedua terhadap yang bersangkutan sebagai tersangka," jelasnya.

Sebelumnya informasi tentang keberadaan dan pernikahan Riza Chalid itu disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

"Bahwa Riza Chalid diduga telah lama tinggal di Johor Malaysia dan terdapat dugaan telah melakukan pernikahan dengan kerabat kesultanan di sebuah negara bagian Malaysia," tuturnya.

"Pernikahan ini telah memperkuat posisi Riza Chalid di Malaysia dalam bentuk jejak digital fotonya bersama Anwar Ibrahim menghadap Sultan Kedah," jelasnya.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 18 tersangka. Belasan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan saudagar minyak Mohammad Riza Chalid selaku Beneficial Owner dari PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan anaknya Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

Kejagung menyebut total kerugian negara dalam perkara korupsi tersebut mencapai Rp285 triliun yang terdiri dari kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 dan Rp91,3 triliun dari kerugian perekonomian negara.**(cnni/js)**

Eks Ketua PN Surabaya Dituntut 7 Tahun Penjara .....

Dari Halaman 1

pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur (31) dan gratifikasi.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Suparmono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara," kata jaksa saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/7).

Jaksa juga menuntut Rudi untuk dihukum membayar denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Rudi dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap sejumlah Sin$43.000 untuk menunjuk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan Dini Sera Afriyanti dengan terdakwa Ronald Tannur. Uang suap berasal dari Lisa Rachmat selaku Pengacara Ronald Tannur.

Pengurusan perkara Ronald Tannur juga melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar dan ibunda Ronald Tannur yaitu Meirizka Widjaja yang juga diproses hukum dalam berkas terpisah.

Menurut jaksa, Rudi terbukti melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Selain itu, jaksa menyatakan Rudi juga terbukti menerima gratifikasi selama periode 2022-2024, saat dia menjabat sebagai Ketua PN Surabaya hingga Ketua PN Jakarta Pusat. Total gratifikasi mencapai 21,9 miliar (kurs saat ini).

Gratifikasi yang diterima Rudi berupa uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Rinciannya sebanyak Rp1,7 miliar, US$383.000, dan Sin$1.099.581.

Uang-uang yang disimpan di rumahnya di Cempaka Mas Barat, Jakarta Pusat, itu telah disita di tahap penyidikan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini. Selama persidangan, Rudi tidak dapat membuktikan uang-uang tersebut berasal dari penerimaan yang sah.

Selain itu, Rudi juga tidak pernah melaporkannya ke Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 30 hari setelah penerimaannya. Bahkan, uang tersebut tidak dicantumkan ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Rudi dinilai terbukti melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam menjatuhkan tuntutan tersebut, jaksa membeberkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan..**(cnni/js)**

Trotoar Medan .....

Dari Halaman 1

parkir liar, hingga lapak dagangan yang menutup akses. Kota ini tampak sibuk mengejar predikat metropolitan, tetapi ironisnya, lupa bahwa peradaban modern selalu dimulai dari pijakan paling dasar: ruang bagi kaki warganya.

Kondisi trotoar di Medan, faktanya, memang berada pada titik nadir. Di berbagai ruas jalan utama, mulai dari kawasan pusat kota hingga jalan sekitar pasar tradisional, trotoar banyak yang tidak rata, penuh lubang, atau bahkan hilang sama sekali karena pembangunan infrastruktur yang tidak disertai perencanaan matang. Vandalisme dan minimnya perawatan membuat jalur ini semakin jauh dari kata layak. Akibatnya, pejalan kaki terpaksa berjalan di badan jalan, berbagi ruang dengan kendaraan bermotor yang melaju kencang. Situasi ini bukan hanya tidak nyaman, tetapi juga berbahaya. Bukankah hal ini merupakan bukti nyata bahwa hak publik benar-benar diabaikan?

Lebih parah lagi, trotoar di banyak titik justru beralih fungsi. Parkir liar mendominasi sepanjang bahu jalan dan jalur pedestrian, terutama di kawasan komersial dan sekitar pasar. Di area permukiman pun, banyak kendaraan roda empat parkir sembarangan hingga menghalangi jalan masuk warga. Pedagang kaki lima (PKL) menumpuk dagangan di jalur pejalan kaki, bahkan ada trotoar yang dijadikan tempat penumpukan material konstruksi. Fenomena ini menggambarkan dua masalah mendasar: lemahnya pengawasan pemerintah dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang publik. Padahal, undang-undang sudah jelas menegaskan bahwa trotoar adalah hak eksklusif pejalan kaki—bukan untuk kendaraan, apalagi sebagai gudang sementara.

Tak hanya melanggar hukum, kondisi semrawut ini juga mencoreng citra kota. Medan terlihat kumuh, tidak teratur, dan jauh dari wajah kota modern yang diidamkan. Jalan-jalan yang penuh parkir liar, PKL, dan material proyek menciptakan kesan bahwa ruang publik adalah wilayah tanpa aturan. Padahal, kota yang benar-benar layak huni adalah kota yang ramah terhadap pejalan kaki. Trotoar yang baik bukan hanya fasilitas pendukung, melainkan cerminan peradaban urban yang sehat.

Ancaman keselamatan menjadi dampak paling serius. Tanpa trotoar yang layak, pejalan kaki dipaksa beradu nyali di tengah arus kendaraan. Data kecelakaan di banyak kota besar menunjukkan bahwa pejalan kaki adalah kelompok paling rentan menjadi korban. Di Medan, situasi ini ibarat bom waktu yang setiap saat siap meledak jika tidak segera diatasi. Apakah pemerintah kota akan terus membiarkan situasi ini berlangsung tanpa solusi?

Sudah saatnya Pemerintah Kota Medan menjadikan trotoar sebagai prioritas pembangunan kota. Revitalisasi jalur pedestrian dengan desain yang aman, rata, estetis, dan ramah disabilitas adalah langkah mendesak. Trotoar yang terawat akan mengundang warga untuk lebih banyak berjalan kaki, mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor, mengurai kemacetan, sekaligus meningkatkan kualitas udara.

Penertiban fungsi trotoar juga tidak bisa ditunda lagi. Parkir liar dan pedagang kaki lima perlu ditangani dengan pendekatan persuasif, bukan sekadar digusur, melainkan ditata dan dipindahkan ke lokasi yang lebih tepat. Pemerintah juga harus melibatkan komunitas warga, aktivis kota, dan kelompok pecinta lingkungan untuk mengawal kebijakan ini agar trotoar tidak kembali dikuasai kepentingan komersial jangka pendek.

Trotoar adalah hak publik paling mendasar. Jika Medan benar-benar ingin menampilkan wajah kota modern, langkah awalnya bukan membangun jalan layang atau pusat perbelanjaan megah, melainkan menata jalur sederhana tempat warganya melangkah. Trotoar bukan sekadar jalur pejalan kaki; ia adalah simbol penghormatan pada martabat manusia, cermin kepedulian pemerintah pada warganya, dan fondasi dari sebuah kota yang beradab.(*)

Keadilan Tanpa Pandang Bulu

Dari Halaman 1

beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran..." (QS. An-Nisa': 135)

Ayat ini turun bukan hanya untuk zaman Nabi, melainkan untuk setiap zaman yang terus menghadapi ujian keadilan. Di era kita saat ini, seruan ini terasa sangat profetik, bahkan revolusioner. Ketika masih banyak keadilan yang dibeli, kekuasaan yang kebal hukum, dan suara-suara kebenaran yang dibungkam karena tekanan politik, ayat ini hadir sebagai pengingat bahwa keadilan adalah nilai Ilahi, bukan sekadar konstruksi manusia.

Keadilan dalam ayat ini tidak bersifat selektif. Allah tidak membedakan status sosial: kaya maupun miskin, penguasa maupun rakyat jelata, semuanya berada dalam orbit pengawasan Tuhan. Dalam dunia modern, kita sering menyaksikan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ayat ini menantang struktur ketidakadilan semacam itu dengan prinsip bahwa keadilan tidak boleh bergantung pada kekuasaan atau kekayaan.

Vonis terhadap beberapa tokoh politik dan elit bisnis akhir-akhir ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menuntut adanya keadilan substantif. Namun, pertanyaannya: apakah keadilan yang ditegakkan itu murni karena Allah, atau karena tekanan publik dan citra politik? Ayat ini mengajak setiap pemangku kepentingan—hakim, jaksa, politisi, dan media—untuk menjadi saksi kebenaran demi Allah, bukan demi kepentingan.

Ayat ini juga menyoroti bahwa penghalang utama keadilan adalah hawa nafsu. Hawa nafsu bisa berupa keinginan mempertahankan kekuasaan, menyelamatkan kolega, menutupi kesalahan diri, atau meraup keuntungan sepihak dalam perjanjian dagang internasional. Ketika hawa nafsu menjadi kompas moral, maka keadilan akan bergeser dari porosnya.

Di sisi lain, masyarakat juga diuji untuk tidak menyebarkan kebencian, fitnah, atau prasangka dalam memperjuangkan keadilan. Ayat ini tidak hanya mengajarkan keberanian bersikap, tetapi juga ketelitian dan kesaksian yang jujur. Dalam dunia digital, ketika informasi berseliweran tanpa filter etika, penting bagi media dan publik untuk tetap berpegang pada prinsip kebenaran dan pertanggungjawaban moral.

QS. An-Nisa' ayat 135 bukan sekadar nasihat pribadi, melainkan seruan kolektif bagi bangsa. Indonesia akan terus diuji dengan berbagai persoalan keadilan: dari korupsi, perdagangan manusia, ketimpangan ekonomi, hingga hukum yang tidak konsisten. Jika bangsa ini ingin bangkit dengan martabat, maka prinsip keadilan Ilahiyah ini harus menjadi ruh dalam sistem hukum, kebijakan ekonomi, dan perilaku politik.

Lebih dari sekadar kutipan ayat, QS. An-Nisa' 135 adalah cermin moral dan arah kebijakan. Ia mengajak kita tidak hanya sekadar mengecam kezaliman, tetapi juga membersihkan diri dari keberpihakan yang tidak adil. Dalam doa-doa kita, kita memohon agar Allah menegakkan kebenaran. Tapi dalam tindakan kita, seringkali kita menegakkan kepentingan.

Maka, hari ini, mari kita jadikan ayat ini sebagai pengingat dan penuntun langkah: bahwa keadilan bukan hanya ideal, tapi perintah Tuhan yang harus diperjuangkan.